



Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Asset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang

Nurleli Fitriyani¹, Samirah Dunakhir*², Nur Afiah³

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

³Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: samirah.dunakhir@unm.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 23, 2024

Revised July 10, 2024

Accepted August 20, 2024

Available online August 21, 2024

Kata Kunci:

rasio keuangan daerah; kinerja keuangan; keuangan

Keywords:

Regional financial ratios, financial performance; finance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan pada badan keuangan dan asset daerah Kabupaten Enrekang. Populasi penelitian ini adalah berupa laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang, sedangkan sampel adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2020-2022. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran belanja daerah BKAD Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2020-2022 termasuk kategori efektif yang mengindikasikan bahwa pemerintah sudah cukup baik dalam merealisasikan belanja daerahnya walaupun ada kenaikan dan penurunan tingkat anggaran, tingkat efisiensi anggaran belanja termasuk dalam kategori kurang efisien yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu meminimalisir terjadinya pemborosan dan tidak memaksimalkan pengelolaan dalam penggunaan sumber daya, tingkat pertumbuhan keuangan daerah termasuk dalam kategori positif yang mengindikasikan bahwa pemerintah sudah cukup baik dalam merealisasikan pendapatan daerah, tingkat

kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori pola hubungan yang instruktif yang mengindikasikan bahwa pemerintah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial, tingkat ketergantungan keuangan daerah termasuk dalam kategori tinggi yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum bisa mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.

ABSTRACT

This research aims to analyze financial performance at the Enrekang Regional Financial and Asset Agency of Enrekang Regency. The population of this research is in the form of financial reports at the Regional Financial and Asset Agency of Enrekang Regency, while the sample is a report on the realization of the regional income and expenditure budget at the Regional Financial and Asset Agency of Enrekang Regency for the 2020-2022 fiscal year. Data collection was carried out using documentation and interview techniques. Data analysis was carried out using quantitative descriptive analysis. The results of this research indicate that the level of effectiveness of the Enrekang Regency BKAD regional budget for the 2020-2022 fiscal year is included in the effective category which indicates that the government is quite good at realizing its regional spending even though there are increases and decreases in budget levels, the level of efficiency of the budget is included in the less efficient category which indicates that regional governments have not been able to minimize the occurrence of waste and have not maximized management in the use of resources, the level of regional financial growth is included in the positive category which indicates that the government is quite good at realizing regional income, the level of regional financial independence is included in the category of instructive relationship patterns which indicates that the government has not been able to implement regional autonomy financially, the level of regional financial

dependence is in the high category, which indicates that the regional government has not been able to optimize the potential of existing sources of income.

1. PENDAHULUAN

Kinerja Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Pelaksanaan otonomi daerah diberdayakan dengan memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan serta menggali sumber-sumber berpotensi yang ada di daerah masing-masing. Undang-undang yang menaungi otonomi daerah adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia sendiri dapat dilihat dari bentuk nyata penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang berdiri atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan.

Menurut Pekei (2016:7), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat menurut Machmud, Kawung, & Rompas (2014:5) harus seminimal mungkin, maka pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut (PAD) menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang harus dioptimalkan, sehingga dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar untuk dapat melaksanakan kemandirian atas Pemerintah Daerahnya masing-masing

Disisi lain Pemerintah Daerah juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerahnya dengan baik. Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah adalah mengelola keuangan daerah agar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikelola berlandaskan prinsip, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif (Pekei 2016:150). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan maka setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pertanggungjawaban tersebut tidaklah cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai (Mahmudi, 2019:2).

Maka dari itu Undang-Undang No.17 Tahun 2003 sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 telah mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut (APBD) berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Halim & Kusufi, 2014:38-39). APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah (Perda) untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Mahsun, Sulistiyowati, & Purwanugraha, 2015:81).

Untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan suatu entitas dalam hal ini pemerintah daerah dapat dilihat dalam laporan keuangannya. Analisis Laporan Keuangan merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih rinci (Mahmudi, 2019:89). Mahmudi (2019:13) mengungkapkan bahwa tidak semua orang bisa membaca laporan keuangan, untuk itu perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan dalam menerjemahkan informasi laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan dan bagaimana mengevaluasi laporan keuangan serta mengetahui kinerja keuangan.

Kinerja keuangan tercermin dari laporan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas (Mahmudi, 2019:89). Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disebut LRA merupakan salah satu pertanggungjawaban keuangan yang utama. Jika dibandingkan dengan neraca, LRA menduduki prioritas yang lebih penting karena jenis laporan keuangan daerah ini merupakan yang paling dahulu dihasilkan sebelum neraca dan laporan arus kas. Analisis laporan keuangan memerlukan teknik tertentu, teknik analisis laporan keuangan berdasarkan LRA diantaranya yang dapat digunakan yaitu analisis pertumbuhan (trend) berupa analisis pertumbuhan pendapatan dan analisis rasio keuangan berupa rasio kemandirian, efisiensi, ketergantungan dan rasio efektivitas (Mahmudi, 2016:90). Belanja daerah ialah seluruh keluaran kas daerah maupun kewajiban yang dinyatakan berupa berkurangnya nilai kekayaan bersih pada periode anggaran tertentu yang mana didapatkan lagi pembayarannya oleh pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja daerah diartikan sebagai keseluruhan keluaran rekening kas umum daerah yang dapat menyebabkan pengurangan saldo anggaran lebih pada suatu periode anggaran tertentu dimana pembayarannya tidak didapatkan lagi oleh pemerintah.

Analisis kinerja keuangan dengan perhitungan rasio keuangan ini pun diharapkan bisa memberikan informasi yang akurat dimana nantinya akan digunakan sebagai acuan penentuan kebutuhan dan merencanakan kinerja di masa yang akan datang. Mengingat permasalahan di BKAD Kabupaten Enrekang (Kepala bidang anggaran) yaitu perencanaan program dan kegiatan yang ada belum menggunakan data yang akurat. Selain itu BKAD (Kepala bidang anggaran) juga memiliki masalah lain yaitu berupa tuntutan dimana harus bisa meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat maupun instansi lainnya. Berikut data laporan realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang:

Tabel 1 Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2017-2019

Tahun	Efektivitas			Efisiensi		
	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Persentasi	Realisase Belanja Langsung	Realisasi Belanja	Persentase
2017	1.094.641	987.600	90%	835.489	987.600	85%
2018	1.094.641	1.006.485	92%	803.332	1.006.485	80%
2019	1.165.226	1.050.617	90%	848.435	1.050.617	81%

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1, Pelaksanaan realisasi anggaran dan belanja pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang pada umumnya belum mencapai target namun sudah dalam kategori efektif. Dapat dilihat nilai tingkat persentasenya mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2017-2019, pada tahun 2017 sebesar 90% hal ini disebabkan karena realisasi belanja lebih kecil daripada target anggaran belanja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang disebabkan karena anggaran belanja masih sama dengan tahun sebelumnya dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang disebabkan karena kegiatan lainnya dapat terlaksana dengan baik pada tahun sebelumnya sehingga anggaran belanja sesuai dengan realisasinya.

Tabel 2 Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2017-2019

Tahun	Pertumbuhan Pendapatan			Pertumbuhan Belanja		
	Realisasi Pendapatan (Pn)	Realisasi Pendapatan (Po)	Persentasi	Realisasi Belanja (Pn)	Realisasi Pendapatan (Po)	Persentase
2017	1.000.409	1.032.816	-3%	987.600	1.091.335	-10%
2018	1.014.028	1.000.409	1%	1.006.485	987.600	2%
2019	1.064.637	1.014.028	5%	1.050.617	1.006.485	4%

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang, 2023 (Data diolah)

Keterangan:

Pn = Tahun yang dihitung

Po = Tahun Sebelumnya

Berdasarkan tabel 2, Pertumbuhan pendapatan daerah pada BKAD Kabupaten Enrekang mengalami kenaikan, adanya peningkatan pendapatan daerah maka juga menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah. Dari tabel tersebut terlihat realisasi pendapatan dan belanja daerah pada BKAD Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang terlihat pada tabel, adanya peningkatan yang terjadi disetiap tahunnya terjadi dikarenakan pendapatan setiap tahunnya didukung oleh kenaikan pendapatan transfer dari pusat dalam merealisasikan pendapatan daerah yang dinilai positif.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis mengangkat masalah tentang penilaian kinerja keuangan pada BKAD Kabupaten Enrekang untuk mengetahui seberapa mandiri, efektif, efisien dan akuntabelnya. Dengan melakukan penelitian pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang, dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Asset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang".

2. METODE

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kuantitatif yang berkaitan dengan informasi berupa angka-angka untuk memperoleh datanya. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (Sugiyono, 2017:35). Data yang digunakan adalah data primer berupa Laporan

Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang tahun 2020-2022 yang diambil dari proses dokumentasi dan wawancara di kantor BKAD.

Variabel dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel tunggal berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu Rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, dan rasio ketergantungan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dilakukan analisa untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang ada. Kemudian, dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

1. Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai dengan kerangka waktu dan hasil yang diharapkan. Proses kerja akan efektif jika telah direncanakan sebelumnya dan dijadwalkan untuk pelaksanaan yang optimal. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja. Semakin besar nilai tingkat efektivitas yang diperoleh atau semakin besar target terealisasi maka dapat mengindikasikan bahwa semakin efektif kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintahan. Berikut merupakan rumus untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja (Mahsun, 2018):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Nilai Efektivitas Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 190.013.125}{\text{Rp } 198.015.413} \times 100\% \\ &= 96\% \end{aligned}$$

Nilai ini menunjukkan tingkat efektivitas pada BKAD tahun 2020 adalah sebesar 96%. Hal ini berarti tingkat efektivitas anggaran belanja tahun 2020 termasuk dalam kriteria efektif. Berdasarkan rumus, berikut nilai efektivitas BKAD Kabupaten Enrekang tahun 2020-2022.

Tabel 3 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2020-2022

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Sisa Anggaran	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2020	198.015.413	190.013.125	8.002.288	96%	Efektif
2021	189.637.822	181.581.364	8.056.458	96%	Efektif
2022	172.247.173	160.275.694	11.971.479	93%	Efektif
Rata-rata 3 Tahun	186.633.469	177.290.061	9.343.408	95%	Efektif

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 3, tingkat efektivitas anggaran belanja BKAD Kabupaten Enrekang pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 6% yang disebabkan jumlah anggaran belanja lebih besar dari tahun sebelumnya, serta kinerja keuangan pemerintah daerah sudah baik dalam melakukan penghematan anggaran tanpa mengurangi proporsi pembelanjaan. Kemudian pada tahun 2021, tingkat efektivitas anggaran belanja masih sama dengan tahun 2020 dimana disebabkan karena proses Pembangunan dan kegiatan lainnya dapat terlaksana dengan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan dan mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja APBD semakin baik. Selanjutnya pada tahun 2022, tingkat efektivitas anggaran belanja kembali mengalami penurunan sebesar 3% yang disebabkan oleh perubahan tentang kebijakan dan retribusi daerah. Rata-rata tingkat efektivitas pada tahun 2020-2022 sebesar 95% yang termasuk kategori efektif.

Hasil perhitungan dan analisis rasio efektivitas tersebut dapat dikatakan adanya kenaikan dan penurunan perubahan anggaran belanja dan realisasinya pada setiap tahunnya. Adanya perubahan pada jumlah anggaran belanja dan realisasinya yang berkaitan dengan *outcome* dapat terjadi karena beberapa faktor seperti perubahan dari jumlah anggaran belanja daerah yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah untuk belanja operasi. Dengan adanya perbedaan anggaran dan realisasi pada setiap tahunnya maka akan memperoleh sisa anggaran, hal tersebut dapat menunjukkan penyerapan anggaran yang menggambarkan kinerja organisasi dalam hal memberikan pelayanan publik. Maka dari itu pada jumlah anggaran belanja dan realisasi belanja daerah tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi.

2. Analisis Efisiensi

Efisiensi mengasumsikan bahwa telah menetapkan tujuan yang tepat dan mencoba menemukan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Tingkat efisiensi diukur dengan rasio antara *input* dengan *output* dalam proses kegiatan operasional. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi (Mahsun, 2018):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Nilai Efektivitas Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 0}{\text{Rp } 190.013.125} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Nilai ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja langsung lebih rendah dibandingkan realisasi belanja dengan nilai rata-rata tingkat efisiensi sebesar 0%. Jadi hasil tingkat efisiensinya yaitu $100\% - 0\% = 100\%$, termasuk dalam kategori tidak efisien. Berikut nilai efisiensi BKAD Kabupaten Enrekang tahun 2020-2022:

Tabel 4 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2020-2022

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Rata-Rata	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2020	0	190.013.125	0%	100%	Tidak Efisien
2021	8.542.190	181.581.364	5%	95%	Kurang Efisien
2022	9.087.470	160.275.694	6%	94%	Kurang Efisien
Rata-Rata 3 Tahun	5.876.553	177.290.061	3%	97%	Kurang Efisien

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4, tingkat efisiensi anggaran belanja Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2020 sebesar 0% yang disebabkan karena BKAD memiliki 2 fungsi yaitu Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan BKAD itu sendiri dan mengapa menghasilkan 0% dikarenakan nilai pada aplikasi dimasukkan di PPKD yang tergabung dengan LRA Kabupaten. Kemudian pada tahun 2021 setelah hasil pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) memberi saran agar realisasi anggaran belanja langsung sudah tidak di gabung ke LRA Kabupaten atau realisasi anggaran belanja langsung gabung ke LRA BKAD itu sendiri, tingkat efisiensi anggaran belanja mengalami penurunan disebabkan tingkat realisasi anggaran belanja lebih rendah dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2022, tingkat efisiensi anggaran belanja kembali mengalami penurunan yang masih disebabkan karena tingkat realisasi anggaran belanja lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun hal ini sudah tidak bisa dikatakan wajar dikarenakan tingkat efisiensi sudah masuk dalam kategori kurang efisien. Rata-rata tingkat efisien pada tahun 2020-2022 sebesar 97% termasuk dalam kategori kurang efisien yang dapat dimaknai kurang baik berdasarkan kriteria yang ada maka penggunaan anggaran pada tahun ini dapat dikatakan kurang efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Efisien ditentukan oleh ketepatan dalam menggunakan anggaran pada program-program prioritas yang dimasukkan ke dalam anggaran belanja.

Meskipun mengalami kenaikan dan penurunan tingkat efisien setiap tahunnya namun pada dasarnya kinerja anggaran yang ada dapat dikatakan baik, pembiayaan dari penggunaan anggaran yang lebih akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam pembiayaan tahun berikutnya. Kinerja pemerintah akan terindikasi tidak baik jika realisasi anggaran belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan, maka dari itu sebaiknya pemerintah dapat mengoptimalkan kinerja instansi agar dapat dikatakan baik dengan melakukan efisiensi terhadap pengeluaran pembiayaan instansinya.

3. Analisis Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah

dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode berikutnya. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Berikut merupakan rumus untuk mengukur pertumbuhann keuangan daerah. (Mahmudi, 2019):

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pn} - \text{Po}}{\text{Realisasi Pendapatan Po}} \times 100\%$$

Nilai Rasio Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} &= \frac{\text{Rp } 1.042.033.673 - \text{Rp } 1.012.914.352}{\text{Rp } 1.012.914.352} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 29.119.321}{\text{Rp } 1.012.914.352} \times 100\% \\ &= 3\% \end{aligned}$$

Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan tahun 2020 adalah sebesar 3%. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan tahun terhitung lebih kecil daripada realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

Berdasarkan rumus, berikut nilai Pertumbuhan Pendapatan Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang.

Tabel 5 Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2020-2022

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Pertumbuhan Pendapatan			Persentasi
	Realisasi Pendapatan (Pn)	Realisasi Pendapatan (Po)	Realisasi Pendapatan (Pn - Po)	
2020	1.042.033.673	1.012.914.352	29.119.321	3%
2021	971.161.932	1.042.033.673	-70.871.741	-7%
2022	976.995.635	971.161.932	5.833.703	1%

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa Pertumbuhan Pendapatan Badan Keuangan dan Asset Daerah pada tahun 2020 sebesar 3%. Sedangkan pertumbuhan pendapatan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar -7%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan atau kestabilan sumber pendapatan yang lain misalnya pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Dan selanjutnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 1% dikarenakan pendapatan setiap tahunnya di dukung oleh kenaikan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan dalam merealisasikan pendapatan daerah yang dinilai positif.

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Pn} - \text{Po}}{\text{Realisasi Belanja Po}} \times 100\%$$

Nilai Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan Belanja} &= \frac{\text{Rp } 190.013.125 - \text{Rp } 183.399.548}{\text{Rp } 183.399.548} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 6.613.577}{\text{Rp } 183.399.548} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 4\%$$

Nilai ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja tahun 2020 adalah sebesar 4%.

Berdasarkan rumus, berikut nilai pertumbuhan belanja pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang.

Tabel 6 Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2020-2022

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Pertumbuhan Belanja			Persentasi
	Realisasi Belanja (Pn)	Realisasi Belanja (Po)	Realisasi Belanja (Pn - Po)	
2020	190.013.125	183.399.548	6.613.577	4%
2021	181.581.364	190.013.125	-8.431.761	-4%
2022	160.275.694	181.581.364	-21.305.670	-12%

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 6, Pertumbuhan Belanja Badan Keuangan dan Asset Daerah tahun 2020 sebesar 4%. Pertumbuhan Belanja pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar -4% dikarenakan belanja rutin BKAD mengalami peningkatan begitupun dengan belanja pembangunan. Sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar -12% yang masih disebabkan karena belanja rutin BKAD mengalami peningkatan begitupun dengan belanja pembangunan.

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan BKAD dapat disimpulkan bahwa Pemerintah BKAD Kabupaten Enrekang dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dinilai positif karena mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Analisis Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. (Mahmudi, 2016). Berikut rumus rasio kemandirian dihitung dengan:

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Nilai Rasio Kemandirian Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Kemandirian} &= \frac{\text{Rp } 19.118.572}{\text{Rp } 984.948.051 + 0} \times 100\% \\ &= 2\% \end{aligned}$$

Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian BKAD tahun 2020 sebesar 2%.

Berdasarkan rumus, berikut nilai Kemandirian pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang.

Tabel 7 Analisis Rasio Kemandirian pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2020-2022

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2020	19.118.572	984.948.051	2%	Rendah Sekali	Instruktif
2021	21.647.113	1.026.485.206	2%	Rendah Sekali	Instruktif
2022	21.938.976	1.206.447.181	2%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 7, menunjukkan bahwa hasil rasio kemandirian selama tiga tahun berada pada rata-rata 2%. Hal ini dapat dilihat pada pendapatan asli daerah dari tahun 2020-2022 mengalami kenaikan disebabkan karena kesadaran masyarakat yang selalu tepat waktu dalam membayar kewajiban atau pajak dan retribusi daerah yang mana dana tersebut sebagai sumber pendapatan yang sangat diperlukan oleh daerah. Dengan demikian, BKAD Kabupaten Enrekang masih sangat bergantung pada pendapatan lain-lain terutama pajak dan retribusi yang artinya belum bisa mempertahankan kemandirian keuangan daerahnya.

Berdasarkan analisis kemandirian keuangan daerah bahwa semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan analisis tersebut, dapat digambarkan bahwa hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2020-2022 tingkat kemandirian daerah BKAD Kabupaten Enrekang dalam mencakupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).

5. Analisis Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. (Mahmudi, 2016). Berikut rumus yang digunakan:

$$\text{Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Contoh Cara memperoleh nilai Rasio Ketergantungan Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Ketergantungan} &= \frac{\text{Rp } 984.948.051}{\text{Rp } 1.042.033.673} \times 100\% \\ &= 95\% \end{aligned}$$

Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan BKAD Kabupaten

Enrekang tahun 2020 sebesar 95%.

Tabel 8 Analisis Rasio Ketergantungan pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2020-2022

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Persentase	Kemampuan Keuangan
2020	984.948.051	1.042.033.673	95%	Tinggi
2021	916.110.206	971.161.932	94%	Tinggi
2022	880.321.968	902.261.146	98%	Tinggi

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan pada BKAD Kabupaten Enrekang tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 memiliki nilai sebesar 95% termasuk dalam kategori tinggi, pada tahun 2021 terjadi penurunan dengan nilai sebesar 94% termasuk dalam kategori tinggi, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 98% dan dalam kategori tinggi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan membandingkan antara anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja. Semakin besar nilai tingkat efektivitas yang diperoleh atau semakin besar target yang terealisasikan maka dapat mengindikasikan bahwa semakin efektif kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintahan.

Dari hasil penelitian pada tingkat efektivitas anggaran belanja pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berada pada kategori efektif dengan tingkat efektivitas pada tahun 2020 sebesar 96% dikarenakan kinerja keuangan pemerintah daerah sudah baik dalam melakukan penghematan anggaran tanpa mengurangi proporsi pembelanjaan. Pada tahun 2021 sebesar 96% dikarenakan jumlah anggaran belanja lebih besar dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2022 sebesar 93% mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja APBD semakin baik. Rata-rata tingkat efektivitas pada tahun 2020-2022 sebesar 95% artinya bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sudah dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa BKAD Kabupaten Enrekang sudah merealisasikan anggaran belanjanya secara optimal dari anggaran yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dikatakan optimal karena pembangunan yang dilakukan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya penolakan dari masyarakat dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Faktor cuaca yang mendukung juga menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya kegiatan pembangunan dengan tepat waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD semakin baik walau jumlah anggaran belanja mengalami kenaikan dan penurunan anggaran. Mahsun (2018) mengungkapkan bahwa "efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai atau target

kebijakan. Dimana program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila proses dari kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sesuai target kebijakan (*spending wisely*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifrizaral (2020) yang menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireun pada tahun 2019 -2021 dengan rata-rata sebesar 101,74% dengan kriteria efektif atau sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireun dalam mencapai realisasi anggaran belanja sudah merealisasikannya secara maksimal dari anggaran yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran atau tujuan organisasi.

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi mengasumsikan bahwa telah menetapkan tujuan yang tepat dan mencoba menemukan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Dari hasil perhitungan tingkat efisiensi PAD pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang dari tahun 2020-2022 berada pada kategori kurang efisien disetiap tahunnya dengan tingkat efisiensi pada tahun 2020 sebesar 100%, mengindikasikan bahwa BKAD Kabupaten Enrekang belum mampu menggunakan anggaran belanja dengan tepat, tahun 2021 sebesar 95% dan tahun 2022 sebesar 94%. Rata-rata tingkat efisiensi pada tahun 2020-2022 sebesar 97% dikarenakan jumlah realisasi anggaran lebih besar dari yang dianggarkan serta belum mampu menutupi anggaran belanjanya. Hal ini menunjukkan bahwa BKAD Kabupaten Enrekang belum optimal atau kurang baik dalam mengalokasikan dan menggunakan sumber daya. Serta belum mampu meminimalisir terjadinya pemborosan dan tidak maksimalnya pengelolaan dalam penggunaan sumber daya. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifrizaral (2020) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Di kabupaten Bireun pada tahun 2019-2021 yang berada pada kategori efisien dengan rata-rata 100,56%.

Tingkat efisiensi jika dilihat tabel sebelumnya, adanya kenaikan dan penurunan hasil persentase rasio efisiensi setiap tahunnya dikarenakan terdapat perbedaan pada capaian realisasi anggaran belanja langsung terhadap realisasi anggaran belanja. Dengan diperolehnya kriteria kurang efisien, dapat diartikan bahwa belum tercapainya realisasi anggaran belanja pada BKAD Kabupaten Enrekang karena masih melebihi ketentuan dari kriteria efisiensi yang telah ditetapkan, karena BKAD membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan programnya.

Rasio pertumbuhan keuangan daerah pada BKAD Kabupaten Enrekang dapat dilihat bahwa pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif meskipun fluktuatif. Berdasarkan perhitungan rasio Pertumbuhan pendapatan dapat diketahui bahwa selalu terjadi kenaikan dan penurunan daerah dari tahun 2020-2022. Upaya pemerintah BKAD dalam meningkatkan pendapatan daerahnya dapat dikatakan berhasil meskipun sebagian besar pendapatannya masih bersumber pada bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD pada BKAD Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar -7%, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 1%. Untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki pada BKAD dengan cara

meningkatkan nilai PADnya karena akan lebih baik apabila tidak tergantung pada bantuan pemerintah pusat agar bisa mandiri mengolah daerahnya dengan PAD yang tinggi.

Jika melihat dari perhitungan rasio pertumbuhan belanja pada BKAD mengalami kenaikan dan penurunan dimana pada tahun 2020 sebesar 4%, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -4% dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar -12%. Tingkat pertumbuhan jika dilihat tabel sebelumnya, adanya kenaikan dan penurunan persentase setiap tahun dikarenakan oleh beberapa kendala seperti kendala dalam pengadaan barang, tidak terlaksananya proyek-proyek yang dijalankan dan kurangnya penyerapan anggaran tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Putra (2016) dengan rata-rata tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Rasio kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berdasarkan perhitungan pada rasio kemandirian keuangan daerah dapat diketahui bahwa rasio keuangan pada BKAD Kabupaten Enrekang pada tahun 2020 sebesar 2% atau tergolong rendah sekali, selanjutnya pada tahun 2021 tingkat kemandiriannya sebesar 2%, dan pada tahun 2022 tingkat kemandiriannya sebesar 2%. Namun demikian kemampuan keuangan BKAD masih rendah sekali atau masih berpola instruktif. Artinya peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dibandingkan kemandirian Pemerintah Daerah atau dengan kata lain masih bergantung dengan pihak eksternal.

Jadi kemandirian keuangan BKAD Kabupaten Enrekang secara keseluruhan masih dikatakan sangat rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan PAD yang di dapatkan oleh BKAD Kabupaten Enrekang masih sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Putra (2016) dengan tingkat rata-rata kemandirian yang tergolong masih rendah sekali atau berpola instruktif.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Enrekang tahun 2020-2022 pada tabel 13 diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah menurut rasio ketergantungan keuangan BKAD Kabupaten Enrekang masuk dalam kategori tinggi. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan BKAD Kabupaten Enrekang menunjukkan hasil dengan kategori tinggi sebesar 95%, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 94% hal ini dikarenakan rendahnya dana bagi hasil pajak/bagi bukan pajak. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 98% dan termasuk dalam kategori tinggi karena tingginya dana alokasi khusus. Rata-rata nilai rasio ketergantungan keuangan daerah BKAD Kabupaten Enrekang termasuk dalam kategori tinggi. Dikatakan tinggi karena persentase pengukuran kemampuannya berada pada tingkat dengan nilai sebesar 87,5% - 100%.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pandjaitan, Tommy & Untu yang menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan kinerja keuangan daerah pemerintah kota Manado tahun 2011-2016 mengalami tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dari pemerintah pusat dalam pemberian dana (transfer). Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado dalam penerimaan dana dari pemerintah pusat masih sangat tergantung yang disebabkan masih rendahnya kontribusi PAD dibandingkan pendapatan transfer.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Tingkat efektivitas anggaran belanja daerah pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2020-2022 termasuk kategori efektif. Hal ini dikarenakan upaya pemerintah dalam penghematan anggaran dengan tidak mengurangi proporsi pembelanjaan sehingga tata kelola keuangan daerah dari segi pemasukan maupun pengeluaran sudah baik. Kedua, tingkat efisiensi anggaran belanja pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2020-2022 termasuk dalam kategori kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa BKAD Kabupaten Enrekang belum optimal atau kurang baik dalam mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang ada dan belum mampu meminimalisir terjadinya pemborosan dan tidak memaksimalkan pengelolaan dan penggunaan sumber daya. Ketiga, tingkat pertumbuhan pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2020-2022 termasuk dalam kategori pertumbuhan positif. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima BKAD Kabupaten Enrekang setiap tahunnya. Disisi lain pada belanja operasi mengalami kenaikan dan penurunan positif dibandingkan belanja modal.

Keempat, tingkat kemandirian pemerintah Kabupaten Enrekang dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih rendah, sehingga termasuk kedalam pola hubungan yang instruktif yakni peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa BKAD Kabupaten Enrekang belum mampu meningkatkan dan mengelola hasil pendapatan asli daerah karena masih bergantung dengan dana pemerintah pusat. Kelima, tingkat ketergantungan daerah untuk pemerintah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2020-2022 dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa BKAD Kabupaten Enrekang masih terlihat tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dilihat dari penerimaan transfer anggaran dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian dan kesimpulan yang dijabarkan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut. Bagi Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang, pada tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja, hendaknya dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan untuk tahun berikutnya secara maksimal dalam mengalokasikan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada tingkat efisiensi pelaksanaan

anggaran belanja, hendaknya ditingkatkan dalam pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan untuk tahun berikutnya dan pada tingkat pertumbuhan diharapkan dapat lebih optimal dalam pengalokasian anggaran sehingga proporsi anggaran menjadi lebih berimbang. Terakhir, pada tingkat ketergantungan dan kemandirian, hendaknya mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasi oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan PAD dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah serta meningkatkan besaran pendapatan asli daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value For Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 78-85. DOI: <https://doi.org/10.30596/jrab.v15i1.428>
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul *Financial Ratio Analysis for Performance Appraisal at Gunung Kidul District Government*. 32, 33-48. <https://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109>
- Halim, A. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Jumingan. (2018). *Analisis laporan keuangan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 1-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/4181>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFPE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI. Mulyadi. (2015). *Pengantar Manajemen*. Bogor : CV. In Media.
- Munawir, S. (2015). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Panjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset*

Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 6(3), 1398–1407.
<https://doi.org/10.35794/emba.v6i3.20224>

- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017*.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prasetyo, W., & Nugraheni, A. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015-2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 1-10.
<https://doi.org/10.23887/jimat.v11i1.24639>
- Rahmawati, N. K. E., & Putra, I. wayan. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 1767–1795.
<http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=458235>
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2015). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4). <https://doi.org/10.35794/emba.3.4.2015.10580>
- SAIFRIZAL, M. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Di Kabupaten Bireuen. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 2(3), 202-211. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i3.1561>
- Sanjaya, S., & Rizky, M. F. (2018). Analisis Profitabilitas dalam Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Taspen (Persero) Medan. *KITABAH*, 2(2), 278–293.
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/view/4152>
- Sari, I. I., & Yousida, I. (2019). Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5(1). <https://doi.org/10.35972/jieb.v5i1.264>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2017). *Analisis laporan keuangan : Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. 85(1), 2071–2079.

- Wonda, W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3), 192-200. <https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.13668>
- Wachid, A. (2014). Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/365>